

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Gambaran Umum Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan adalah salah satu daerah Kabupaten selain Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Tanjung Balai Karimun, yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Secara historis, Kabupaten Bintan dibentuk berdasarkan PP No.5 Tahun 2006 Tanggal 23 february 2006, Kabupaten Kepulauan Riau Berubah Nama Menjadi Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di manca-nagara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di laut cina selatan karena itulah julukan kepulauan "Segantang Lada" sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Natuna

Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan

Sebelah Timur: Propinsi Kalimantan Barat

Sebelah Barat : Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam

Secara administrasi, Kabupaten Bintan membawahi 10 Kecamatan, 47 Desa, dan 14 Kelurahan. Berikut adalah tabel jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Bintan Tahun 2008.

Tabel 2.1

Jumlah Kelurahan dan Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2008

No.	Kecamatan (Nama)	Kelurahan	Desa
1	Bintan Timur	4	6
2	Bintan Utara	4	4
3	Teluk Bintan	0	5
4	Bintan Pesisir	2	4
5	Teluk Sebong	0	6
6	Gunung Kijang	1	6
7	Tambelan	1	5
8	Mantang	0	4
9	Lobam	2	3
10	Toapaya	0	4
Jumlah		14	47

Sumber : Bahan Ajar Diklat PIM IV Bupati Bintan 2008

Jarak antara kecamatan-kecamatan dengan pusat kota relatif cukup dekat ditambah lagi dengan kondisi sarana transportasi yang cukup memadai, walaupun di beberapa tempat kondisi jalan cukup bagus. Panjang prasarana jalan di Kabupaten Bintan pada tahun 2008 tercatat sepanjang 409,363 km² yang terdiri dari jalan Negara sepanjang 11,720 km², jalan provinsi sepanjang 24,410 km² dan jalan Kota sepanjang 242,313 km² serta non status sepanjang 130,920 km².

a. Keadaan Geografis.

Pada umumnya Kabupaten Bintan merupakan daerah yang beriklim tropis basah dengan curah hujan 1.065 mm. Seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten ini juga mengalami dua musim yaitu musim penghujan yang terjadi pada bulan September s.d bulan Desember dan musim kemarau pada bulan Januari dan bulan Agustus. Adapun rata-rata suhu udara maksimum di Kabupaten Bintan berkisar antara 31,8^o C dan suhu minimum berkisar antara 23,9^o C.

Kabupaten Bintan memiliki garis pantai lebih kurang 96 Km yang membentang dari arah Utara ke Barat Laut dengan posisi laut berada Di Pantai Trikora, serta termasuk dalam kategori perairan Selat Malaka dan sebagian dari Samudera Hindia. Dilihat dari panjangnya garis pantai yang dimiliki tersebut sepiintas terkesan bahwa perairan Kabupaten Bintan relative kecil. Namun Kabupaten ini memiliki fasilitas perikanan yang memadai untuk kegiatan pendaratan dan penyimpanan serta transaksi hasil perikanan di pelabuhan perikanan pantai Trikora.

b. Keadaan Demografis.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada akhir Tahun 2002 jumlah penduduk di Kabupaten Bintan sebanyak 105.996 jiwa, terdiri dari 55.226 jiwa laki-laki dan 51.770 jiwa wanita dengan sex ratio 108,98 dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3 % per tahun. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 3.659 jiwa/km², yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bintan boleh dikatakan cukup merata pada setiap kecamatan. Kecamatan Bintan Timur adalah merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan 35.045 jumlah penduduk mencapai jiwa sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Mantang dengan jumlah penduduk 3.608 jiwa yang diakibatkan karena adanya pemekaran dari kecamatan ini menjadi dua kecamatan dari satu kecamatan sebelumnya yaitu Kecamatan Bintan Pesisir. Begitu pula dengan tingkat kepadatannya, di mana kepadatan yang tertinggi terdapat di Kecamatan Teluk sebong yaitu 342 jiwa/km² dan yang terkecil kepadatannya adalah Kecamatan Mantang yaitu 49 jiwa/km². sebahagian penduduk terkonsentrasi di pusat kota dan pesisir pantai. Berikut dapat dilihat komposisi jumlah penduduk per kecamatan.

Tabel 2.2

Komposisi Jumlah Penduduk di Kabupaten Bintan Tahun 2008

No.	Kecamatan (Nama)	Penduduk (Jiwa)
1	Bintan Timur	35.045
2	Bintan Utara	19.449
3	Teluk Bintan	8.58
4	Bintan Pesisir	7.871
5	Teluk Sebong	11.209
6	Gunung Kijang	9.079
7	Tambelan	4.641
8	Mantang	3.608
9	Lobam	15.584
10	Toapaya	7.611
Jumlah		122.677

Sumber : Kabupaten Bintan dalam Angka 2008

Penduduk Kabupaten Bintan pada umumnya bekerja di sektor jasa karena seperti pada umumnya yang terjadi pada daerah-daerah ibukota provinsi lainnya, sebahagian besar penduduknya bekerja pada sektor jasa. Memang banyak pula yang bekerja pada sektor pertanian, sektor perdagangan, industry dan konstruksi sedangkan di sektor lain jumlahnya relatif kecil. Secara lebih jelas jumlah penduduk menurut lapangan usaha tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bintan
Tahun 2008

No.	Lapangan Usaha (Nama)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	3.381	3,47
2	Pertambangan dan Galian	166	0,17
3	Industri	6.127	6,38
4	Listrik, Gas dan Air	789	0,81
5	Konstruksi	10.017	10,28
6	Perdagangan	27.819	28,55
7	Komunikasi	4.814	4,94
8	Keuangan	3.099	3,18
9	Jasa	40.984	42,06
10	Lain-lain	40.984	0,16
Jumlah		97.441	100

Sumber : Kabupaten Bintan dalam Angka 2008

Di Kabupaten Bintan ini juga terdapat beraneka ragam suku bangsa karena selain dulunya merupakan tempat transito perdagangan sehingga

banyak menarik bangsa lain untuk datang dan menetap, sekarang pun Kabupaten ini yang merupakan pusat dari pemerintahan, kebudayaan Melayu dan pendidikan telah banyak menarik pula suku bangsa lain untuk bertempat tinggal di kota ini baik dalam rangka perdagangan, menempuh pendidikan dan lain sebagainya.

Komposisi tersebut menyebabkan heterogenitas suku yang mendiami Kabupaten Bintan dan telah melakukan interaksi sosial dan budaya yang cukup baik. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya kawin campur di antara suku-suku tersebut sebagai akibat dari persinggungan yang sangat erat di antara mereka, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik (budaya).

Sedangkan jumlah penduduk usia kerja akan bertambah dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Kabupaten Bintan pada tahun 2003 berjumlah 69.714 jiwa dan yang bekerja sebanyak 49.236 jiwa (81,42 %). Dari jumlah penduduk yang bekerja tersebut sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 24.806 jiwa (82,45 %). Pekerja sektor pertanian paling banyak berada pada lapangan pekerjaan pertanian tanaman pangan, yaitu sebanyak 15.531 jiwa yang diikuti lapangan pekerjaan perkebunan sebanyak 9.205 jiwa.

c. Keadaan Ekonomi

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan kemampuan keuangan daerah yang

memadai. Pemerintah Kabupaten Bintan dalam usahanya untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga kuantitas dan kualitas pembangunan dapat ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Mempertajam skala prioritas obyek pembangunan dengan mengutamakan proyek-proyek yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas. Disamping itu ditekankan pula penghematan dan efisiensi terutama untuk belanja rutin
3. Meningkatkan sistem manajemen dan sarana prasarana serta kemampuan profesional personil, terutama bagi dinas-dinas daerah yang mengelola sumber PAD
4. Menempatkan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi sebagai landasan kerja segenap dinas dan aparatur pemerintahan daerah serta meletakkan pengendalian dan pengawasan atas semua kegiatan pembangunan pada posisi yang sangat strategis, sehingga dapat dilakukan antipasti, upaya preventif sampai represif terhadap tindakan dan perilaku yang keluar dari kerangka peraturan yang ada

Dari kebijakan pengambilan langkah-langkah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bintan telah berhasil meningkatkan kondisi keuangan dan perekonomian daerahnya. Perkembangan ekonomi Kabupaten Bintan salah satunya dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Regional Bruto merupakan serangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dan berupa pendapatan kotor perekonomian yang belum dikurangi dengan Pajak Pendapatan Hasil (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dengan kata lain merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan (9) lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik dan Air Minum, (5) Bangunan/Konstruksi, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, dan (9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

Naik atau turunnya angka PDRB biasa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Sedangkan untuk keperluan analisis biasanya mempergunakan harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan. Pengaruh inflasi telah

ditiadakan, sehingga semakin tinggi kenaikan PDRB maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Bintan tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan atas Dasar Harga Konstan Periode
Tahun 2007-2008**

No.	Lapangan Usaha (Nama)	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Pertanian	3,26	3,21
2	Pertambangan dan Galian	-10,14	-28,90
3	Industri Pengolahan	3,14	3,67
4	Listrik dan Air Minum	0,80	1,336
5	Konstruksi/Bangunan	4,14	15,34
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	2,41	3,41
7	Komunikasi dan Pengangkutan	2,13	1,01
8	Bank dan Lembaga Keuangan	-33,05	34,99
9	Jasa	1,55	2,61
<i>Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi</i>		3,55	4,18

Sumber : Kantor BPS Kabupaten Bintan Tahun 2008

Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran PDRB adalah PDRB Per Kapita, Pendapatan per Kapita dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka pendapatan per Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Bintan di dalam menjalankan misinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Bintan. Setiap sektor ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam rangka menunjang perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan mengetahui kontribusi dari masing-masing sector, kita akan mendapatkan gambaran sector-sektor yang cukup berpotensi dan mempunyai peluang untuk ditingkatkan peranannya dalam pembangunan daerah.

d. Keadaan Sosial Budaya

1) Keadaan Agama

Pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan di bidang material semata, tetapi juga kemajuan dalam bidang mental spiritual. Hal ini dapat diwujudkan apabila pemahaman agama semakin baik dan inklusif oleh masing-masing pemeluknya dengan terpenuhinya segala kebutuhan rohani umat melalui ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah.

Pembangunan kehidupan beragama sangat penting dalam rangka pembangunan mental dan spiritual untuk menciptakan kualitas manusia yang berakhlak dalam kehidupan yang semakin kompleks. Tumbuhnya iman dan takwa dengan harapan terbangunnya rasa toleransi agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

Dengan terbentuknya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan masyarakat menjadi manusia-manusia yang memiliki pemahaman dan pendefinisian agama dalam konteks inklusif sehingga dapat menghindari konflik-konflik yang disebabkan oleh sentimen

agama. Apabila situasi kondusif dapat terpelihara, maka akan berimplikasi positif dalam proses pembangunan dan pembinaan masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas kehidupan bernegara.

Heterogenitas penduduk beragama dalam memeluk agama dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Bintan Tahun 2008

No.	Agama (Nama)	Pemeluk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	102.236	91,26
2	Kristen Khatolik	3.548	2,71
3	Kristen Protestan	4.694	1,42
4	Budha	8.179	1.13
5	Hindu	251	0,46
6	Khonghucu	3.018	2,13
Jumlah		122.677	100

Sumber : Kabupaten Bintan dalam Angka 2008

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Bintan memeluk agama Islam 91,26 % sehingga tidak mengherankan apabila di daerah ini menerapkan syariat Islam. Sedangkan sarana peribadatan di Kabupaten Bintan sampai tahun 2008 untuk masjid 184 buah, gereja Protestan 5 buah dan gereja Khatolik sebanyak 6 buah serta Vihara sebanyak 15 buah.

2) Keadaan Pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan global dewasa ini, pendidikan merupakan modal dasar dan

sebagai sarana bagi seorang manusia berfikir dalam usaha memahami dan mendalami informasi serta teknologi yang sedang berkembang. Melalui pendidikan manusia belajar membangun diri dan lingkungannya agar dapat bertahan dalam kehidupan yang semakin kompleks dan kompetitif.

Tingginya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat memungkinkan untuk memperoleh akses informasi dan menumbuhkan inovasi serta kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, penyerapan dan penguasaan terhadap teknologi akan semakin besar, yang pada gilirannya akan menumbuhkan produktivitas kerja yang tinggi.

. Di bawah ini adalah tabel presentase penduduk menurut ijazah tertinggi pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bintan:

Tabel 2.6

Presentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Bintan Tahun 2008

No	Tingkat Pendidikan (Nama)	Presentase Penduduk (%)
1	Tidak Sekolah	5,28
2	SD/MIN	21,70
3	SLTP/MTsN	19,48
4	SMU/MAN	18,36
5	SMK	5,80
6	DI/DII	0,73
7	DIII	1,11
8	D IV/S1/S2/S3	1,92
Jumlah (%)		100

Sumber : Kabupaten Bintan dalam Angka 2008

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen oleh MPR RI pada Bab XIII ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan pada ayat (4) sebagai tambahan yang berbunyi bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dalam rangka mencapai tujuan negara yang antara lain dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka sektor pendidikan harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Pendidikan merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan dalam menghadapi tuntutan zaman di era globalisasi sangat membutuhkan individu-individu yang berpendidikan atau memiliki intelektualitas yang memadai yang dibarengi dengan kuatnya spiritualitas baik secara kualitas maupun kuantitas.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah ini yaitu :

- a. Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan tidak merata pula tingkat pendidikan masyarakat.
- b. Jumlah sarana dan tenaga pengajar yang sangat minim.
- c. Jarak sekolah yang relatif jauh merupakan penghambat bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal.

- d. Rendahnya motivasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- e. Alasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.
- f. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan formal dalam upaya memperbaiki taraf hidup.

Berbagai upaya pemerintah maupun pihak swasta di bidang pendidikan adalah menyediakan berbagai sarana fisik dan pengadaan tenaga pengajar karena salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas tingkat pendidikan. Guna meningkatkan sumber daya manusia di daerah agar memiliki ketrampilan dan keahlian di segala bidang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dapat diwujudkan melalui pendidikan. Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bintan membangun berbagai saran dan prasarana penunjang pendidikan. Hal ini dilaksanakan guna mencapai tahap mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai dengan tahun 2008 jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Bintan menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

Jumlah Sekolah di Kabupaten Bintan Tahun 2008

No	Jenis Pendidikan (Nama)	Jumlah
1	TK	35
2	SD	91
3	MI	5

4	SLTP	22
5	MTs	7
6	SMU	5
7	SMK	4
8	MA	1
9	Akademi Keuangan	1
10	Akademi Bidan & Perawat	1
11	Universitas Raja Haji Fisabilillah	1
Jumlah		173

Sumber: Kabupaten Bintan dalam Angka 2008

3) Keadaan Kesehatan.

Salah satu kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bintan di bidang kesehatan adalah dengan menyediakan berbagai infrastruktur dan pengadaan tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Usaha ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu fisik sumber daya manusia.

Rumah sakit merupakan salah satu prasarana paling vital yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2008, Kabupaten Bintan memiliki Rumah Sakit Umum sebanyak 2 buah, sedangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang meliputi Puskesmas Lengkap sebanyak 6 buah, Puskesmas Keliling sebanyak 6 buah, dan 20 buah Puskesmas Pembantu. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai di wilayah Kabupaten Bintan sebenarnya memberikan peluang kepada

masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan, namun kurangnya kesadaran dan kemauan akan pentingnya menjaga kesehatan dan mengobatinya sehingga dirasakan kehadiran rumah sakit tidak cukup meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungannya.

Tabel 2.8

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2008

No	Sarana Kesehatan (Nama)	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	2
2	Puskesmas	6
3	Puskesmas Pembantu	20
4	Puskesmas Keliling	6
5	Pos Yandu	101
6	Poliklinik desa	11
7	Rumah Sakit Ibu dan Anak	1
8	Rumah Sakit jiwa	1
Jumlah		149

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2008

Sedangkan program Keluarga Berencana (KB) berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Pentingnya program Keluarga Berencana mengingat besarnya potensi angka kelahiran penduduk di wilayah Kabupaten Bintan, sementara tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat terutama wanita-wanita produktif belum memadai. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bayi-bayi yang akan dilahirkan.

4) Keadaan Pemerintahan.

Dalam perencanaan stratejik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 02 Tahun 2003 disebutkan bahwa Kabupaten Bintan memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi Pemerintah Kabupaten Bintan.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Dengan kata lain visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Bertitik tolak dari nilai-nilai yang dianut tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan pemerintah dan masyarakat kota sebagai tujuan yang terluas dan terumum untuk mendapatkan yang terbaik, maka visi Kabupaten Bintan sebagai berikut :

“Layar Berkembang Menuju Kabupaten Bintan 2010 Yang Sejahtera,
Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah:

Layar Berkembang, diambil dari pepatah Melayu Yaitu “*Sekali Layar Berkembang Pantang Surut Kebelakang*” yang Bermakna jika orang Melayu telah berazam untuk melaksanakan suatu pekerjaan maka pantang baginya berpatah balik sehingga pekerjaan tersebut telah

diselesaikannya. pepatah ini memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dari aspek perjuangan, pengabdian, kesetiaan, kebersamaan, dan semangat dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Layar Terkembang juga merupakan singkatan dari Pelayanan Masyarakat untuk Tercapainya Kemajuan Pembangunan. Yang merupakan *ideology inti* bagi organisasi Pemerintahan Kabupaten Bintan.

b. Misi Pemerintah Kabupaten Bintan

Atas dasar visi yang telah dikemukakan diatas Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan enam buah misi untuk mencapainya. Misi-misi tersebut akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menetapkan prioritas-prioritas pembangunan. Misinya yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar perekonomian yang kuat melalui peningkatan pembangunan ekonomi rakyat secara terpadu dan terencana dalam berbagai kegiatan sektoral dengan memperhatikan unsur spasial.
2. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri di era perdagangan bebas dengan tetap memperhatikan budaya melayu sebagai ciri khasnya.
3. Mewujudkan peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya (*good governance*) dan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan.

4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
5. Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana social, ekonomi dan transportasi dengan prioritas daerah-daerah terbelakang.
6. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya malalui promosi dan peningkatan investasi untuk pengembangan ekonomi khususnya industri pariwisata.

Menyikapi hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2004-2008 menetapkan 9 (sembilan) strategi sebagai berikut :

1. Menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, damai dan tentram.
2. Mempercepat proses penyelesaian kasus KKN dan pelanggaran HAM untuk mendukung tercapainya supremasi hukum.
3. Meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang telah ada dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang baru dengan mengembangkan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan serta jasa-jasa lingkungan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Melaksanakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara konsisten dan serasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dalam rangka pengendalian program daerah dan sektoral.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya-upaya perbaikan manajemen dan mutu pendidikan yang berorientasi pada Iptek dan Imtaq.
 6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemerataan pelayanan, kesehatan serta biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar kota dan pemukiman dengan meningkatkan pembangunan jaringan jalan, drainase, sanitasi lingkungan, penyediaan perumahan murah dan peningkatan pelayanan air bersih untuk warga kabupaten.
 8. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan terhadap aparat pemerintah dan swasta serta masyarakat Kabupaten Bintan.
 9. Menyempurnakan sistem administrasi pemerintahan secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- 2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bintan**

Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bintan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan sebagai salah satu perangkat Daerah Kabupaten Bintan mempunyai peranan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman bagi

pengelola pembangunan daerah. Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka Bappeda Kabupaten Bintan merumuskan visinya.

Berdasarkan visi tersebut, kondisi yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Bintan adalah:

1. Perencanaan pembangunan daerah yang dinamis dalam artian bahwa perencanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan perkembangan kondisi social budaya yang terjadi dalam masyarakat
2. Perencanaan pembangunan arah yang terpadu dapat diartikan sebagai perencanaan pembangunan yang disusun merupakan keterpaduan dari berbagai sector, kepentingan masyarakat, kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun merupakan hasil dari aspirasi yang berkembang, baik dari masyarakat, pemerintah maupun sector swasta dan dapat diterima oleh semua pihak.
4. Perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan memiliki makna bahwa perencanaan pembangunan yang disusun harus memperhatikan aspek-aspek dan upaya-upaya kelestarian sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
5. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi daerah dimaksudkan sebagai perencanaan pembangunan yang disusun harus

mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bintan sesuai dengan kondisi social budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Bintan merumuskan misi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah secara efektif, dinamis dan terpadu.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta konsisten.

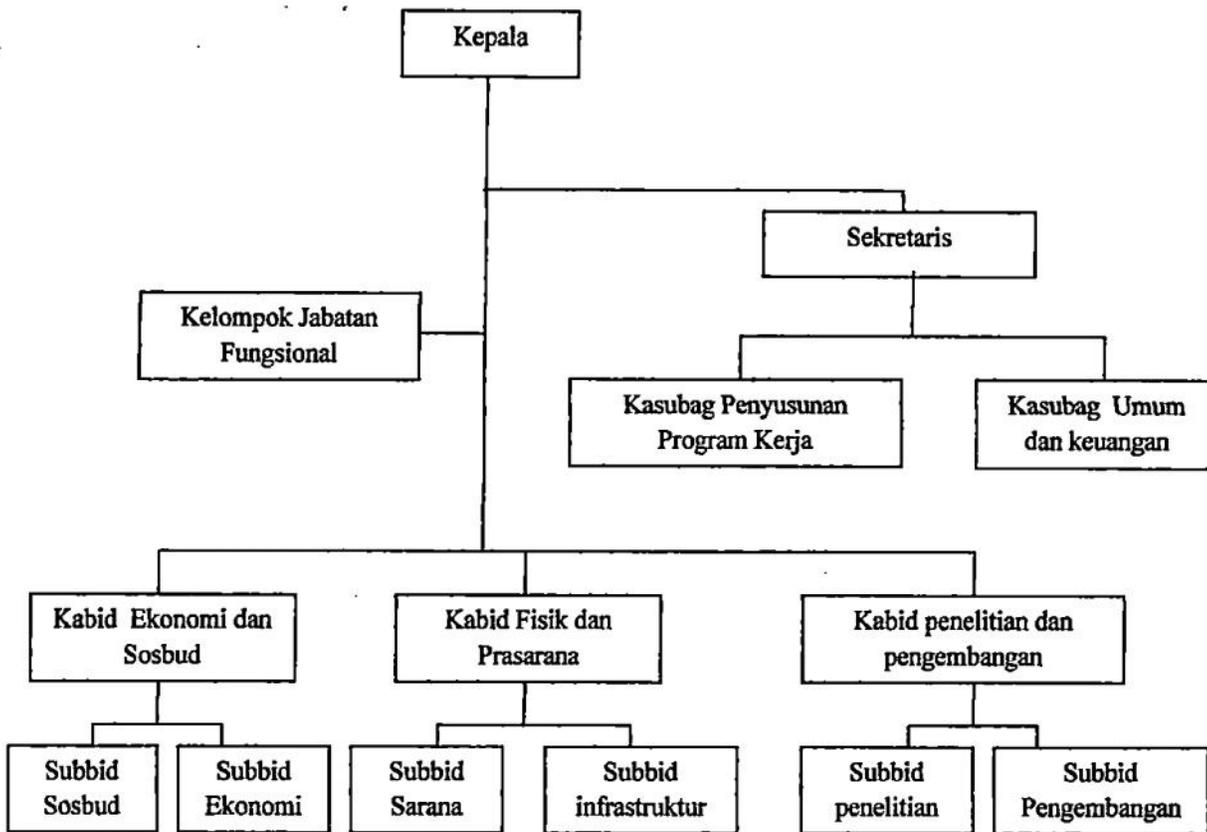
a. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bintan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan sebagai revisi peraturan perundangan yang lama dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka susunan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bintan mengalami perubahan yang signifikan. Dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BINTAN**

Dasar Hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2005



Sumber : Bappeda Kabupaten Bintan 2008

b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan keputusan bupati Bintang Nomor 16 tahun 2006 sebagai kelanjutan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Bintang nomor 11 tahun 2005 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bintang, maka kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintang adalah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bappeda Kabupaten Bintang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintang selanjutnya disebut BAPPEDA Kabupaten Bintang merupakan unsur pelaksana teknis dibidang Perencanaan Pembangunan.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Penetapan Kepala Badan, personil, eselonering jabatan struktural maupun fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok

BAPPEDA Kabupaten Bintan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dibidang perencanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah.

4. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. menyusun RPJM Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- d. menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah.
- e. menyusun Perencanaan Strategi Daerah (renstrada).
- f. menyusun Rencana Arah Kebijakan Umum Daerah.
- g. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan pada satuan organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah kabupaten.
- h. melakukan verifikasi usulan rencana kegiatan instansi berdasarkan dokumen perencanaan daerah.
- i. memonitor dan memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah.
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan keuangan dan Sub Bagian Program dan Evaluasi.

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1) menghimpun data dan menyusun rencana anggaran;
- 2) melakukan pengelolaan tata usaha keuangan;
- 3) melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan badan lainnya;
- 4) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- 5) melakukan surat-menyurat, penggandaan dan tata kearsipan;
- 6) menyusun rencana kebutuhan dan melakukan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan dan peralatan kantor;
- 7) menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- 8) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 9) melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- 10) melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Penyusunan Program Kerja mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan dan melakukan evaluasi;
- 2) melaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan daerah (FKKP) tingkat kecamatan dan kabupaten;

- 3) membantu melakukan koordinasi dalam mempersiapkan rencana program dan kegiatan antar bidang, dinas / instansi kecamatan dan dinas / instansi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bintan;
- 4) melaksanakan evaluasi terhadap aspek akuntabilitas program dan kegiatan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- 5) melakukan kegiatan lain dalam rangka mendukung perencanaan program dan kegiatan sesuai petunjuk pimpinan.

ii. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan program pembangunan fisik dan perencanaan serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi Sub Bidang Sarana dan Sub Bidang Infrastruktur.

a. Sub Bidang Sarana mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program bidang sarana;
- 2) mendata dan menginventarisasi bidang sarana dan prasarana BAPPEDA;
- 3) mengawasi dan mengevaluasi penggunaan sarana;
- 4) mempersiapkan usulan pengadaan dan penghapusan barang-barang inventaris sarana dan prasarana;
- 5) menyusun laporan dibidang sarana;

6) melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

b. Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas :

- 1) melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, perhubungan pos dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, lingkungan hidup dan pengairan serta pemukiman dan pembangunan daerah;
- 2) mengkoordinasikan dan mengajukan perencanaan pembangunan, perhubungan pos dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, lingkungan hidup dan pengairan serta pemukiman dan pembangunan daerah yang disusun oleh dinas / instansi satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) melakukan inventarisasi permasalahan dibidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- 4) melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang perencanaan di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yang meliputi perhubungan pos dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah, lingkungan hidup dan pengairan serta pemukiman dan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RAPBD;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

iii. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Bidang ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi sosial Budaya, kegiatan perencanaan pembangunan investasi, keuangan daerah dan pengembangan BUMD, industri perdagangan dan koperasi / UKM pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan serta pertambangan dan energi. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi Sub Bidang Ekonomi dan Sub Bidang Sosial Budaya.

a. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- 1) melakukan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi;
- 2) melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang berkembang di bidang ekonomi;
- 3) melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang ekonomi;
- 4) melakukan evaluasi data perencanaan dibidang ekonomi
- 5) melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan program di bidang ekonomi;
- 6) melakukan / membuat data perencanaan dibidang ekonomi;
- 7) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Sosial mempunyai tugas :

- 1) melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, pelayanan sosial,

olah raga, kependudukan, tenaga kerja serta pemerintahan, hukum dan informasi komunikasi;

- 2) mengkoordinasikan rencana pembangunan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, pelayanan sosial, olah raga, kependudukan, tenaga kerja serta pemerintahan, hukum dan informasi komunikasi yang disusun oleh dinas / instansi, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dibidang perencanaan sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- 4) melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang perencanaan sosial budaya yang meliputi agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kesehatan, pelayanan sosial, olahraga, kependudukan, tenaga kerja serta pemerintahan, hukum dan informasi komunikasi;
- 5) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

iv. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menghimpun, menganalisa data, melakukan monitoring evaluasi, membuat dokumentasi dan memperagakan, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan serta melakukan penelitian dalam rangka menunjang

perencanaan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Sub Bidang Penelitian dan Sub Bidang Pengembangan.

a. Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas :

- 1) melakukan suatu penelitian;
- 2) membuat sistem tentang penelitian perencanaan pembangunan daerah;
- 3) melakukan koordinasi dengan setiap unit kerja yang mengadakan penelitian;
- 4) melakukan penilaian dan penelitian terhadap setiap usulan kegiatan untuk bidang penelitian.

b. Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :

- 1) menyiapkan database perencanaan pembangunan daerah;
- 2) melakukan evaluasi data perencanaan pengembangan pembangunan daerah;
- 3) perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah;
- 4) menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan pengembangan pembangunan daerah;
- 5) melaksanakan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain untuk pelaksanaan tugas;
- 6) membantu kepala bidang penelitian dan pengembangan dibidang tugasnya.

v. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing;
- 2) kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA
- 3) koordinator jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- 4) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis beban, dan bidang kerja;
- 5) pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sarana dan Pagarana Bappeda Kabupaten Bintan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan yang beralamat di Jalan Jendral A Yani Nomor 19 dan berdiri di tanah seluas 1.451 m serta bangunan berupa gedung kantor seluas 480 m merupakan bagian dari organisasi pemerintah daerah yang sudah semestinya dilengkapi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan dan misi organisasi. Adanya sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak akan terciptanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda.

Untuk lebih jelasnya, menurut data yang diperoleh oleh peneliti selama mengadakan penelitian, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9

Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda

Kabupaten Bintan Tahun 2008

No	Jenis Barang (Nama)	Jumlah (Buah)	Keadaan
1	2	3	4
1	Gedung kantor	1	Baik
2	Mobil Dinas	2	Baik
3	Motor Dinas	3	Baik
4	Komputer	8	Baik
5	AC	14	Baik
6	Dispenser	3	Baik
7	Kulkas	2	Baik
8	Meja Biro	4 set	Baik
1	2	3	4
9	Kursi putar	3 set	Baik
10	Lemari Arsip	12	Cukup
11	Filling Cabinet	27	Baik
12	Printer	5	Baik
13	Telepon	2	Baik
14	Televisi	4	Baik
15	Faximile	1	Cukup
16	Aiphone	3	Baik
17	Jam Dinding	9	Baik
18	Kursi Kayu	3 set	Baik
19	Handy Cam	1	Baik
20	Laptop	10	Baik
21	Mesin Tik	10	Baik
22	OHP	2	Baik
23	Wireless	2	Baik

24	Kursi Spon	3 set	Baik
25	Scanner	2	Baik
26	Kamera	3	Baik

Sumber: Bappeda Kabupaten Bintan Tahun 2008